



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

Judul	: Komisi IV Sesalkan Anggaran Puluhan Triliun Tidak Efektif Tingkatkan Produktivitas Petani
Tanggal	: Sabtu, 05 Februari 2022
Surat Kabar	: Rakyat Merdeka
Halaman	: 7

Evaluasi Kebijakan Pupuk Bersubsidi

Komisi IV Sesalkan Anggaran Puluhan Triliun Tidak Efektif Tingkatkan Produktivitas Petani

Ketua Komisi IV DPR, Sudin mendesak, Kementerian Pertanian (Kementerian) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan kebijakan pupuk bersubsidi. Pasalnya, negara mengalokasikan anggaran sebesar Rp 30 triliun untuk program pupuk subsidi pada tahun 2020, namun belum efektif meningkatkan produktivitas para petani Indonesia.

"ISU ini kerap menjadi topik pembahasan dalam pelaksanaan kebijakan pupuk bersubsidi, baik di Rapat Kerja (Raker) maupun Rapat Dengar Pendapat (RDP), apa tindakan yang sudah dilakukan?" tegas Sudin saat membuka Rapat Dengar Pendapat membahas permasalahan pupuk di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (3/2).

Berdasarkan informasi yang diterimanya, Sudin menjelaskan sejumlah permasalahan terkait penyaluran pupuk bersubsidi. Di antaranya, urai dia, ketersediaan pupuk yang tidak sesuai dengan musim tanam, validitas data pada sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK), perdagangan pupuk ilegal, hingga praktik penjualan pupuk bersubsidi secara bundling dengan produk pertanian.

"Kalau otak nggak benar, ya udah nggak benar saja. Mau pakai cara apapun, ya nggak bisa. Mungkin nggak, dalam waktu dekat ini Kementerian membuat terobosan untuk meng-collect data, yang mana saja pihak yang berhak mendapat pupuk bersubsidi?" tanya Politisi PDI Perjuangan

Selain itu, Sudin juga mempertanyakan ketidakjelasan alokasi dan penyaluran pupuk bersubsidi di sektor perikanan. Mengetahui adanya koordinasi yang tidak sinkron, ia mendorong, pemisahan tanggung jawab masing-masing stakeholder yang terlibat dalam penyaluran pupuk bersubsidi.

"Dengan begitu, tugas dan fungsi (tupoksi) masing-masing stakeholder menjadi lebih jelas. Mereka tidak saling lempar tanggung jawab, dalam menghadapi persoalan dan penyaluran pupuk ber-

subsidi," jelas dia.

Pada kesempatan yang sama, ia juga meminta Kementerian tidak main-main mengelola dana Rp 70 miliar untuk kegiatan pengumpulan (*collect*) data RDKK. Menurut dia, dana tersebut harus digunakan untuk pembenahan data RDKK.

Sudin menambahkan, permasalahan dana RDKK yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian dan koordinasi internal Kementerian yang tidak sinkron, sangat mempengaruhi kualitas RDKK ke depannya. "Koordinasi internal di Kementerian saja tidak sinkron. Ini bagaimana, dari RDKK saja sudah bermasalah?" tanya Sudin.

Karenanya, ungkap dia, Komisi IV DPR akan mengundang berbagai pihak terkait, seperti Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian, dan Direktur Jenderal (Dirjen) Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP)

Kementerian. Selain itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian, Dirjen Perikanan Budi Daya Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kementerian KP), dan Direktur Utama (Dirut) PT Pupuk Indonesia.

"Kami minta, RDKK segera diperbaiki. Kemudian, tindak tegas dan berantas oknum-oknum distributor pupuk di seluruh wilayah Indonesia," tandasnya.

Menanggapi hal itu, Dirjen PSP Kementerian, Ali Jamil mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti rekomendasi Tim Panja Pupuk Bersubsidi Komisi IV DPR. Tindak lanjut itu, kata dia, akan diwujudkan melalui pemberian pupuk bersubsidi kepada petani dengan lahan kurang dari 2 hektar (ha), penentuan prioritas penerima pupuk bersubsidi berdasarkan kebutuhan pangan pokok, dan komoditas terdampak inflasi. ■ ONI/TIM

Kalau otak nggak benar,
ya udah nggak benar saja.
Mau pakai cara apapun,
ya nggak bisa. Mungkin
nggak, dalam waktu dekat ini
Kementerian membuat terobosan
untuk meng-collect data,
yang mana saja pihak yang
berhak mendapat pupuk
bersubsidi?

